

ပီပီပီပီပီပီပီပီပီပီ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ဗဟိုအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ကြီးဌာန

JALAN MELATI NOMOR 23 DANGIN PURI KANGIN, DENPASAR (80233)

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံ ဝန်ကြီးဌာန

TELEPON: (0361) 226365

EMAIL: brida@baliprov.go.id WEB ADDRESS: <https://brida.baliprov.go.id>



Bali, 08 Februari 2023

Kepada

Nomor : B.17.000/1044/SEKRET/BRIDA
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) gabung
Hal : Penyampaian Daftar Informasi Publik dan Usulan Informasi yang Dikecualikan

Yth. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali

di -

DENPASAR

Menindaklanjuti surat Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali Nomor : B.24.000/1569/IKP/D.KOMINFOS, tanggal 01 Februari 2023 Perihal Laporan Permohonanan Daftar Informasi Publik dan Usulan Informasi yang Dikecualian Tahun 2023. Bersama ini kami sampaikan Penyampaian Laporan Permohonanan Daftar Informasi Publik dan Usulan Informasi yang Dikecualian di Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 (sebagaimana terlampir).

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN
I Made Gunaja
NIP. 19640620 199003 1 012



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Lampiran I

Nomor : B.17.000/1044/SEKRET/BRIDA

Tanggal : 08 Februari 2023

**DAFTAR USULAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH TAHUN 2023**

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	SEMUA UNIT KERJA	Memorandum dan Disposisi Pimpinan	<ul style="list-style-type: none">UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Menghambat proses pengambilan keputusan/kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
2.		Nota Dinas	<ul style="list-style-type: none">UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Menggangu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan dokumen
3.		Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	<ul style="list-style-type: none">UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf iUU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Tidak Terbatas	Menggangu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan dokumen



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.		Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan 	Tidak Terbatas	Menggangu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan dokumen
5.		Internet Protocol/IP Address Private	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30 	Tidak Terbatas	Rentan akan peretasan pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga penyalahgunaan hak akses	Menjaga/melindungi hak akses (melindungi kerahasiaan database)
6.		Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h 	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan	Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi)
7.		Spesifikasi sarana komunikasi Sandi	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf c UU No 11 Tahun 2008 	Selama sistem digunakan	Rentan Penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.		Sistem Keamanan Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem
9.		Bandwidth Management	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem
10.		Peta Lokasi penyimpanan Arsip	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 44 	Selama masih berlaku	Mengungkap arsip yang menurut sifatnya rahasia	Melindungi penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berkepentingan
11.		Materi klarifikasi berita yang belum ditandatangani pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i 	Sampai ada persetujuan pimpinan	Menghambat proses kebijakan	Mencegah terjadinya kesalahpahaman di masyarakat
12.		Rencana MoU (kerjasama)	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf f 	Sampai MoU dilaksanakan	Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Mendukung kesuksesan kebijakan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13.		Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan SKPD	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Pasal 16 huruf g 	Sampai diaudited oleh tim audit	Mengganggu proses penyusunan	Mencegah terjadinya kesalahpahaman di masyarakat
14.		Rencana kerja Anggaran Tahunan	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Pasal 16 huruf g 	Sampai diaudited oleh tim audit	Mengganggu proses penyusunan	Mencegah terjadinya kesalahpahaman di masyarakat
15.		Rincian dokumen penawaran kontrak atau penawaran penyedia barang/jasa	<ul style="list-style-type: none"> UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 poin 3 huruf b dan pasal 17 huruf b UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pasal 7 huruf b 	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, Perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
16.		Dokumen kontrak barang/jasa beserta lampirannya	<ul style="list-style-type: none"> UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 poin 3 huruf b dan pasal 17 huruf b UU No.11 Tahun 2008 	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, Perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			<p>tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pasal 7 huruf b 		usaha tidak sehat	
17.		Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang digunakan dalam proses lelang	<ul style="list-style-type: none"> • UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 poin 3 huruf b dan pasal 17 huruf b • UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 • Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pasal 7 huruf b 	Sampai dengan umur konstruksi	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, Perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
18.		Proses hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) bermasalah	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 5 Tahun 2014 • PP No. 53 Tahun 2010 • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h 	Tidak Terbatas	Menghambat proses penegakan hukum, mengungkap data pribadi PNS, melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia



No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19.		Data Elektronik PNS (Database)	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h 	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi
20.		Berkas/Arsip Data Pegawai (PNS/Non PNS) yang klasifikasinya dinyatakan pribadi (kesehatan, kondisi keluarga, pendidikan)	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan 	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi
21.		Identitas PNS yang mengajukan izin perkawinan/ perceraian	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h 	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi
22.		Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h 	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi
23.		Daftar Nilai DP3 dan atau SKP PNS	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h 	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi
24.		Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h 	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi
25.		Dokumen Slip Gaji Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h angka 3 	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi
26.		Arsip Akta Otentik yang bersifat pribadi dan wasiat	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf g 	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pegawai yang bersifat pribadi



No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
27.		Data individu sensus dan survei	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 	Sampai mendapat persetujuan dari individu survei	Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi data yang bersifat pribadi
28.		Identitas pemohon informasi	<ul style="list-style-type: none"> UU 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i 	Sampai mendapat persetujuan tertulis dari pemohon informasi	Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi data yang bersifat rahasia
29.		Rekam Medis Keselamatan Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j 	Tidak Terbatas	Rentan Penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan kemananan	Keamanan Data Diri Pegawai
30.		Nomor Rekening Bank Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j 	Tidak Terbatas	Rentan Penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan kemananan	Menjaga/Melindungi hak akses (melindungi kerahasiaan database)
31.		Dokumen hasil pelaporan kekayaan (LHKPN, LHKASN) dan Pajak	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 	Tidak Terbatas	Berpotensi terjadi Penyalahgunaan Data dan mengungkap rahasia pribadi	Mengamankan agar tidak terjadi pengalagunan data



Lampiran II

Nomor : B.17.000/1044/SEKRET/BRIDA

Tanggal : 08 Februari 2023

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI BALI TAHUN 2023**

No	Judul Informasi	Ringkasan isi informasi	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan	Bentuk Informasi		Retensi Arsip
						Cetak	Soft-copy	
1.	SK Ka. BRIDA Nomor: B.17.188.4/99 6/SEKRET/BRIDA Tentang Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada BRIDA Provinsi Bali	Memuat Informasi tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada BRIDA Provinsi Bali	Sekretaris	Kepala Badan	2023	√	√	Aktif
2.	SK Ka. BRIDA Nomor: : B.17.188.4/99 5/SEKRET/BRIDA Tentang Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Tim Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2024	Memuat informasi tentang Tim Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2024	Sekretaris	Kepala Badan	2023	√	√	Aktif
3.	SK Ka. BRIDA Nomor: : B.17.188.4/99 6/SEKRET/BRIDA Tentang Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Tim Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026	Memuat Informasi tentang Tim Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026	Sekretaris	Kepala Badan	2023	√	√	Aktif



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

4.	SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BRIDA	Memuat informasi berupa capaian realisasi anggaran BRIDA Prov. Bali	Sekretaris	Kepala Badan	2023	√	√	Aktif
5.	SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BRIDA	Memuat informasi mengenai standar operasional	Sekretaris	Kepala Badan	2023	√	√	Aktif
6.	SOP Penyusunan Usulan Pergeseran/Perubahan Anggaran	Memuat informasi pembuatan maupun menyusun, pergeseran/perubahan anggaran	Sekretaris	Kepala Badan	2023	√	√	Aktif
7.	SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BRIDA Pemerintah Provinsi Bali	Memuat informasi mengenai penyusunan PPAS SKPD dalam 1 tahun anggaran	Sekretaris	Kepala Badan	2023	√	√	Aktif
8.	SOP Penyusunan Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahunan BRIDA	Memuat informasi berupa PPAS SKPD dan penyusunan anggaran dalam periode 1 tahun anggaran	Sekretaris	Kepala Badan	2023	√	√	Aktif
9.	SOP Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) BRIDA	Memuat informasi dalam penyusunan, menganalisis data dan informasi bahan laporan	Sekretaris	Kepala Badan	2023	√	√	Aktif
10.	SOP Penyusunan Laporan Tahunan BRIDA	Memuat informasi mengenai Menyusun, menganalisis data dan informasi laporan tahunan	Sekretaris	Kepala Badan	2023	√	√	Aktif
11.	SOP Penyusunan Evaluasi Kinerja BRIDA	Memuat informasi mengenai penyusunan dalam Menyusun evaluasi kinerja BRIDA	Sekretaris	Kepala Badan	2023	√	√	Aktif
12.	SOP Penyusunan Penetapan Kinerja BRIDA	Memuat informasi mengenai penetapan kinerja PD BRIDA Prov Bali	Sekretaris	Kepala Badan	2023	√	√	Aktif



13.	SOP Penyusunan Renstra BRIDA Provinsi Bali	Memiliki kewenangan dalam membuat dan Menyusun Renstra PD penyusunan, perencanaan program dan kegiatan PD untuk 5 Tahun kedepan	Sekretaris	Kepala Badan	2023	√	√	Aktif
14.	KAK Sub Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Memuat Informasi tentang Kerangka Acuan Kerja Evaluasi Kinerja BRIDA 2023	Sekretaris	Kepala Badan	2023	√	√	Aktif
15.	KAK Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Memuat Informasi Tentang Kerangka Acuan Kerja Penyusunan Dokumen Perencanaan BRIDA 2023	Sekretaris	Kepala Badan	2023	√	√	Aktif
16.	SOP Cuti Pegawai	Memuat Informasi terkait pengajuan cuti pegawai	Sekretaris	Kepala Badan	2023	√	√	Aktif
17.	SOP jasa komunikasi	Memuat informasi terkait pembayaran telpon	Sekretaris	Kepala Badan	2023	√	√	Aktif
18.	SOP jasa surat menyurat	Memuat informasi tentang surat menyurat	Sekretaris	Kepala Badan	2023	√	√	Aktif
19.	SOP kenaikan pangkat	Memuat informasi tentang pengurusan kenaikan pangkat pegawai	Sekretaris	Kepala Badan	2023	√	√	Aktif
20.	SOP pencetakan dan penggandaan	Memuat Informasi terkait pelayanan percetakan dan penggandaan	Sekretaris	Kepala Badan	2023	√	√	Aktif
21.	SOP penyediaan jasa atk	Memuat informasi terkait penyediaan jasa atk	Sekretaris	Kepala Badan	2023	√	√	Aktif
22.	SOP penyediaan komponen instalasi listrik	Memuat informasi tentang penyediaan komponen listrik	Sekretaris	Kepala Badan	2023	√	√	Aktif
23.	SOP penyediaan makan minum	Membuat informasi tentang penyediaan makan minum	Sekretaris	Kepala Badan	2023	√	√	Aktif
24.	KAK Kegiatan	Memuat informasi tentang kerangka acuan kerja Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Sekretaris	Kepala Badan	2023	√	√	Aktif



25.	KAK Kegiatan	Memuat informasi tentang kerangka acuan kerja Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sekretaris	Kepala Badan	2023	√	√	Aktif
26.	KAK Kegiatan	Memuat informasi tentang kerangka acuan kerja Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Sekretaris	Kepala Badan	2023	√	√	Aktif
27.	KAK Kegiatan	Memuat informasi tentang kerangka acuan kerja Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Bahan tanggapan Pemeriksaan	Sekretaris	Kepala Badan	2023	√	√	Aktif
28.	Keputusan Kepala Badan Riset Nomor B.17.900/76/Sekret/BRIDA	Memuat Informasi tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Selaku Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada BRIDA	Sekretaris	Kepala Badan	2023	√	√	Aktif
29.	SOP penyusunan neraca dan laporan pertanggungjawaban	Memuat Informasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan BRIDA	Sekretaris	Kepala Badan	2023	√	√	Aktif
30.	SOP pengajuan surat perintah membayar	Memuat informasi tentang pengajuan surat perintah membayar	Sekretaris	Kepala Badan	2023	√	√	Aktif
31.	SOP pengelolaan dan penyediaan bahan tanggapan pemeriksaan	Memuat Informasi tentang mengelola dan menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan	Sekretaris	Kepala Badan	2023	√	√	Aktif
32.	SOP pembuat daftar gaji	Memuat Informasi tentang tata cara membuat daftar gaji	Sekretaris	Kepala Badan	2023	√	√	Aktif
33.	SOP sistem pengendalian Intern	Memuat Informasi tentang pengendalian laporan dan spj kegiatan	Sekretaris	Kepala Badan	2023	√	√	Aktif



34.	SOP pelaksanaan verifikasi	Memuat tentang Informasi tentang pelaksanaan verifikasi surat perintah membayar	Sekretaris	Kepala Badan	2023	√	√	Aktif
35.	SK Gubernur Nomor : 65/04-B/HK/2023 Bali tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Tahun 2023	Memuat Informasi tentang daftar nama Tim Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali	Kepala Badan	Gubernur	2023	√	√	Aktif
36.	KAK Kegiatan Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan n Bidang Pemerintahan Umum	Memuat informasi tentang kerangka acuan kerja Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kepala Bidang Pemerintahan, Pengkajian dan Peraturan	Kepala Badan	2023	√	√	Aktif
37.	SOP Keg.Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan n Bidang Pemerintahan Umum 2023	Memuat tentang informasi pelaksanaan kegiatann fasilitasi Kelompok Ahli Bidang Pembangunan	Kepala Bidang Pemerintahan, Pengkajian dan Peraturan	Kepala Badan	2023	√	√	Aktif
38.	SOP Keg. Pengkajian Peraturan 2023	Memuat informasi tentang pelaksanaan kajian peraturan terkait Rancangan Undang-Undang	Kepala Bidang Pemerintahan, Pengkajian dan Peraturan	Kepala Badan	2023	√	√	Aktif
39.	SOP Sensus Semesta Bali Berencana Sumber Daya Bali Berbasis Desa Adat 2023	Memuat informasi tentang kegiatan sensus desa adat	Kepala Bidang Pemerintahan, Pengkajian dan Peraturan	Kepala Badan	2023	√	√	Aktif
40.	06 SOP Ksb. 3 Keg. Data 2023	Memuat informasi tentang pelaksanaan pembuatan Jurnal Bali Membangun Bali	Kepala Bidang Pemerintahan, Pengkajian dan Peraturan	Kepala Badan	2023	√	√	Aktif



41.	KAK Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Memuat informasi tentang kerangka acuan kerja Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Kepala Bidang Pemerintahan, Pengkajian dan Peraturan	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif
42.	KAK Kajian/ Penelitian Bidang Pertanian, Perkebunan Dan Pangan	Memuat Informasi Tentang Penelitian Dan Pengembangan Pemulihan Jeruk Keprok Tejakula	Kepala Bidang Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif
43.	SOP kegiatan penelitian infrastruktur	Memuat informasi tentang kegiatan penelitian infrastruktur	Bidang Penunjang Pembangunan Daerah	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif
44.	SOP kajian bid keamanan	Memuat informasi terkait Kajian bidang keamanan	Bidang Penunjang Pembangunan Daerah	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif
45.	SOP kajian penelitian bidang ekonomi	Memuat Informasi tentang kajian penelitian bidang Ekonomi	Bidang Penunjang Pembangunan Daerah	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif
46.	SOP kegiatan ekonomi makro	Memuat Informasi tentang kegiatan ekonomi makro	Bidang Penunjang Pembangunan Daerah	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif
47.	SOP pendaftaran dan pemeliharaan KI	Memuat informasi tentang cara mendaftar dan pemeliharaan Kekayaan Intelektual	Kepala Bidang	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif
48.	SK Gubernur Bali Nomor 594/04-J/HK/2022 Tahun 2022	Tentang Penerima Penghargaan <i>Kerthi Bali Swacitta Nugraha</i> Bagi Peneliti/Pengembang/Penerap Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Di Provinsi Bali	Kepala Bidang Pengembangan Inovasi dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif
49.	SK Gubernur Bali Nomor 65/04-B/HK/2022 Tahun 2022	Tentang Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Tim <i>Cittakriya Bali Kerthi Nugraha</i> Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	Kepala Bidang Pengembangan Inovasi dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif



50.	SK Kaban BaRI Nomor B.17.000/85/S EKRET/BRIDA Tahun 2023	Tentang Pengangkatan Admin Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Admin Sirup)	Sekretaris	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif
51.	SK Kaban BaRI Nomor B.17.000/92/S EKRET/BRIDA Tahun 2023	Tentang pembentukan dan Susunan Keanggotaan Agen Perubahan	Sekretaris	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif
52.	SK Kaban BaRI Nomor B.17.000/93/S EKRET/BRIDA Tahun 2023	Tentang Pembentukan dan susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi	Sekretaris	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif
53.	SK Gubernur Bali Nomor 25/04-C/HK/2022 Tahun 2022	Tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Tertentu	Sekretaris	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif
54.	SK Gubernur Bali Nomor 24/04-C/HK/2022 Tahun 2022	Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Sub Koordinator Unit Substansi	Sekretaris	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif
55.	SK Kaban BaRI Nomor B.17.000/84/S EKRET/BRIDA Tahun 2023	Tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretaris	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif
56.	SK Kaban BaRI Nomor B.17.000/87/S EKRET/BRIDA Tahun 2023	Tentang Penunjukan Direksi Teknis/Pengawas Pengadaan Barang/Jasa melalui penyelia	Sekretaris	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif
57.	SK Kaban BaRI Nomor B.17.000/86/S EKRET/BRIDA Tahun 2023	Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen	Sekretaris	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif
58.	SK Gubernur Bali Nomor 101/04-B/HK/2023 Tahun 2023	Tentang Penunjukan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil Sebagai Sopir Kaban	Sekretaris	Kepala Badan	2023	✓	✓	Aktif

